

MEMBANGUN DAYA SAING UKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Darwanto
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

ABSTRACT

Small-Medium Enterprise (SME) has important role in national economy on job creating and output. SME create job more than big industry. Eventhough SME role on share of national income is less than big industry. This situation is caused by weakness of competitiveness and productivity of small-medium enterprise. Empowering of competitiveness and productivity is important to overcome this problem. Increasing productivity and competitiveness program on new sector that has high local resource and base on technology would be solution to empowering competitiveness of SME.

Keywords: Small-Medium Enterprise, competitiveness, productivity and local resource.

PENDAHULUAN

Perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) menarik perhatian yang lebih serius dari berbagai kalangan baik pemerintah ataupun masyarakat umum, hal ini tidak terlepas dari peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja, sumbangan pendapatan nasional (GDP) dan ketahanan UKM terhadap berbagai gejolak. Peran UKM dalam perekonomian nasional dinilai sangat strategis. Sektor ini juga dianggap sebagai penyelamat krisis yang dihadapi Indonesia sejak tahun 1997 karena fleksibilitasnya dalam menyiasati perubahan dan kemampuannya menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Ketahanan UKM dalam menghadapi krisis ekonomi diharapkan dapat menolong perekonomian Indonesia menghadapi krisis global yang bermula dari krisis keuangan di AS.

Usaha kecil dan menengah (UKM) juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas yang secara langsung turut menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya. Secara mikro ekonomi UKM keberadaannya sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran

sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UKM apakah tumbuh atau mati seringkali sangat sukar terdeteksi, akan tetapi secara makro ekonomi perkembangan UKM selalu menunjukkan peningkatan.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM, dimana salah satunya adalah keterbatasan pangsa pasar maka strategi pengembangan UKM ini perlu dicermati dengan seksama agar pertumbuhan UKM baru tidak melemahkan yang telah ada. Oleh karena itu sebaiknya pembentukan UKM lebih diarahkan untuk pangsa ekspor atau memenuhi kekurangan permintaan dalam wilayah.

Rendahnya pendidikan SDM pelaku UKM juga menjadi keterbatasan yang perlu mendapat pembinaan yang serius dari pemerintah. Keberadaan UKM yang berada pada semua lapangan usaha dan tersebar di semua lokasi memang menjadi kendala yang sangat menyulitkan dalam melakukan pembinaan, oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengembangkan sentra-sentra UKM untuk memudahkan pembinaan dengan melihat kelompok

komunitas UKM yang ada atau membentuk komunitas UKM baru.

Ada beberapa alasan kuat mengapa usaha kecil menengah perlu dikembangkan di Indonesia. Pertama, Usaha Kecil menyerap banyak tenaga kerja, dimana estimasi Tenaga Kerja yang terserap Usaha Kecil-Menengah sampai tahun 2007 adalah 11 juta orang atau 90 persen dari seluruh angkatan kerja. Adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Melalui modal yang sedikit bisa membangun usaha kecil, teknologi yang digunakan sangat sederhana sehingga bersifat padat karya, yang memerlukan banyak tenaga kerja.

Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Adanya perkembangan UKM yang baik mendorong terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan, sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Kesenjangan pembangunan antara kota dan desa menyebabkan terjadinya urbanisasi yang masif. Akibatnya, masyarakat desa mencari pekerjaan di kota walaupun ada sumber daya alam yang baik di desa. Nilai tambah sektor pertanian yang menurun dan kurangnya kebijakan yang bisa membuat sektor pertanian berkembang mengakibatkan generasi muda tidak mau lagi bekerja di sektor ini. Para sarjana kita juga semakin enggan bekerja di sektor pertanian maupun membuka usaha kecil dan menengah.

Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki (*barrier to entry*).

Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.

Jika semua komponen masyarakat bangsa sepakat bahwa UKM merupakan penyangga perekonomian nasional dan mampu mencegah ambuknya perekonomian seharusnya UKM mendapat perhatian serius, digenjut untuk membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di saat banyak usaha besar yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengembangan UKM yang progresif dimungkinkan karena berbagai faktor yaitu: (1) sebagian besar UKM mengandalkan bahan baku lokal untuk mengembangkan usahanya, (2) tidak memerlukan sumberdaya manusia yang terlatih dan terspesialisasi tinggi, (3) pengembangan teknologi yang bersifat spesifik lokasi akan membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing, (4) sebagian besar produk maupun jasa yang dihasilkan tidak memerlukan *hi-tech*, dan (5) fluktuasi nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah tidak mempengaruhi proses produksi karena berbahan baku lokal, bahkan merupakan *blessing indiguit* terutama UKM yang berorientasi ekspor.

Permasalahan yang Dihadapi UKM

UKM yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia ternyata mempunyai beberapa masalah yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut sudah sering ditemukan dan dikemukakan banyak peneliti sebelumnya. Secara umum UKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang

termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah yang ditemukan Urata (2000) dan dikemukakan kembali oleh Sri Adiningsih. Permasalahan finansial tersebut antara lain: 1) kurangnya kesesuaian (*mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM, 2) tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM, 3) biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil, 4) kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai, 5) bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi, 6) banyak UKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Permasalahan organisasi UKM juga cukup menghambat perkembangan UKM untuk maju. Permasalahan yang termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) antara lain: 1) kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan, 2) kurangnya pengetahuan atasan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, 3)

keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM, serta kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi

METODE

Penelitian dan penulisan paper ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data yang telah ada. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang merupakan data yang dikeluarkan oleh BPS. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian sebelumnya sebagai bahan kepustakaan analisis.

PEMBAHASAN

Potret Kinerja UKM

Kinerja perekonomian Indonesia seperti tercermin dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen terhadap tahun sebelumnya, dimana pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 6,4 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan 9,3 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 8,5 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian 7,8 persen. Pada tahun 2007 nilai PDB UKM mencapai Rp 2.121,3 triliun meningkat sebesar Rp 335,1 triliun dari tahun 2006. Dari jumlah ini UKM memberikan kontribusi sebesar 53,6 persen dari total PDB Indonesia, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai Rp 1.786,2 triliun atau 53,5 persen. Pada tahun 2007 kontribusi Usaha Kecil (UK) sebesar Rp 1.496,3 triliun (37,8 persen), Usaha Menengah (UM) sebesar Rp 625,1 triliun (15,8 persen), dan Usaha Besar (UB) sebesar Rp 1.836,1 triliun (46,4 persen).

Tabel 1
Produk Domestik Bruto UKM, 2006 dan 2007

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Berlaku		Pangsa (%)		Laju Pertumbuhan	
		(triliun Rp)		(triliun Rp)				%	
		2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian	UKM	414,66	524,06	251,28	260,38	12,42	13,24	3,46	3,62
	UB	18,56	23,17	11,13	11,21	0,56	0,59	1,16	0,72
2. Pertambangan	UKM	40,48	51,79	18,91	20,39	1,21	1,31	7,27	7,83
	UB	326,03	389,04	149,12	150,98	9,76	9,83	1,03	1,24
3. Industri	UKM	219,68	255,47	129,2	133,73	6,58	6,46	4,36	3,5
	UB	699,86	813,34	384,9	404,35	20,96	20,55	4,66	5,05
4. LGA	UKM	2,46	2,82	1,14	1,18	0,07	0,07	3,44	3,36
	UB	27,9	31,91	11,11	12,34	0,84	0,81	6,00	11,13
5. Bangunan	UKM	165,74	201,77	74,54	81,45	4,96	5,1	8,2	9,26
	UB	85,39	103,44	37,69	40,45	2,56	2,61	8,6	7,34
6. Perdagangan	UKM	483,57	569,99	300,53	326,07	14,48	14,4	6,46	8,5
	UB	17,98	20,83	11,99	12,88	0,54	0,53	5,45	7,42
7. Pengangkutan	UKM	126,74	135,9	61,31	64,66	3,8	3,43	8,57	5,47
	UB	105,07	129,35	63,67	78,28	3,15	3,27	20,6	22,96
8. Keuangan	UKM	171,79	194,08	108,84	117,1	5,14	4,9	5,45	7,59
	UB	97,33	111,13	61,23	66,56	2,91	2,81	5,51	8,69
9. Jasa-jasa	UKM	161,1	185,42	89,86	96,68	4,82	4,69	7,97	7,6
	UB	175,16	213,87	80,85	85,29	5,25	5,4	4,22	5,49
PDB UKM		1786,2	2121,3	1035,6	1101,64	53,49	53,6	5,73	6,38
PDB UB		1553,26	1836,09	811,68	862,34	46,51	46,4	5,23	6,24
PDB Nasional		3339,48	3957,4	1847,29	1963,97	100	100	5,51	6,32

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS 2008

Kinerja Ekspor

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp 122,3 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 142,8 triliun pada tahun 2007, namun demikian peranannya terhadap total ekspor nonmigas nasional sedikit menurun dari

20,2 persen pada tahun 2006 menjadi 20,0 persen pada tahun 2007. Penurunan ini disebabkan peningkatan ekspor dari hasil produksi UB seperti hasil industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, dan industri bahan kimia industri.

Tabel 2
Nilai Ekspor Nonmigas 2006-2007

Tahun	Satuan	Ekspor Nonmigas				
		UK	UM	UKM	UB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006*	(miliar Rp)	30 365	91 946	122 311	484 775	607 086
	(juta US \$)	3 501	10 602	14 103	55 896	69 998
	(%)	5	15,15	20,15	79,85	100
2007**	(miliar Rp)	35 508	107 314	142 822	570 594	713 416
	(juta US \$)	4 129	12 479	16 607	66 349	82 957
	(%)	4,98	15,04	20,02	79,98	100

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS 2008

Bila dirinci menurut sektor, pada tahun 2007 sebagian besar hasil produksi UKM yang diekspor yaitu 89 persen berupa komoditi yang dihasilkan sektor industri, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 9,8 persen, dan sektor

pertambangan sebesar 1,2 persen. Sedangkan pada UB peranan komoditi sektor industri sebesar 82,3 persen, diikuti sektor pertambangan sebesar 17,5 persen, dan sektor pertanian 0,2 persen.

Tabel 3
Nilai Ekspor Nonmigas menurut Sektor Ekonomi Tahun 2007

Lapangan Usaha	UKM		UB		Jumlah	%
	Nilai	%	Nilai	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	13 998	9,8	1 231	0,2	15 228	2,1
2. Pertambangan	1 717	1,2	99 827	17,5	101 545	14,2
3. Industri	127 107	89	469 536	82,3	596 643	83,7
Jumlah	142 822	100	570 594	100	713 416	100

Sumber: BPS

Permasalahan Ekspor UKM

Dari data nilai ekspor dia atas kita dapat melihat bahwa peran UKM terhadap keseluruhan ekspor Indonesia masih sangat kecil. Hal ini tidak sebanding dengan sumbangan UKM terhadap PDB yang relatif lebih besar dibandingkan usaha Usaha Besar atau perusahaan besar. Kondisi tersebut tidak terlepas dari beberapa permasalahan UKM yang menjadi kendala UKM untuk melakukan ekspor. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan,
- 2) Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor,
- 3) Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor,
- 4) Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.

Pemberdayaan UKM

Pentingnya peran UKM dalam mendorong perekonomian Indonesia

tentunya harus diiringi dengan kesadaran untuk memperkuat UKM dengan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. UKM tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri untuk mendorong perekonomian kita. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja UKM kita. Beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh antara lain:

Pengembangan Kelembagaan UKM

UKM sebagai wahana perbaikan ekonomi bagi masyarakat Indonesia didudukkan sebagai gerakan untuk menolong diri sendiri dengan mengembangkan serta membuka usaha kecil menengah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan. Tugas utama negara terkait dengan UKM adalah fungsi pengaturan atau *regulatory* serta pemberdayaan secara selektif.

Dalam hal pembangunan UKM fokus perhatian sebaiknya ditujukan pada: a) penertiban administrasi badan hukum UKM, b) menata pengawasan pengesahan badan hukum UKM baru, c) menyelenggarakan akreditasi atau penilaian badan hukum UKM secara teratur dan berlanjut sebagai bentuk perlindungan publik, d) memperkuat lembaga pengembangan SDM gerakan koperasi, e) memperkuat lembaga keuangan UKM dengan mempersiapkan kelembagaan simpan pinjam untuk UKM, f) perkuatan permodalan dilakukan selektif dan diarahkan untuk memperkuat sistem keuangan UKM.

Kehadiran kelembagaan UKM yang kuat dengan pemberdayaan UKM terutama usaha mikro adalah keberadaan wahana untuk bekerjasama bagi para produsen dan konsumen serta pengguna jasa terutama jasa keuangan. Dengan peta kekuatan UKM setelah sepuluh tahun dilanda krisis, di mana peluang UKM semakin besar.

Pemberdayaan UKM diharapkan dapat terus mendongkrak citra UKM sebagai pendorong perekonomian masyarakat di semua tingkatan.

Pemberdayaan UKM ke depan diharapkan mampu memperbaiki posisi dan peran pembangunan UKM. Pemberdayaan ini seharusnya mengikuti pola dan strategi untuk peningkatan daya saing untuk pertumbuhan dan ekspor serta dukungan terhadap perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Untuk tujuan yang pertama penguatan lembaga UKM pendukung terutama sub-sektor jasa perusahaan harus menjadi unsur pendorong. Pada tujuan yang kedua lembaga keuangan mikro harus menjadi fokus perkuatan disertai dengan pengembangan sistem kelembagaan yang efisien serta peningkatan kapasitas pendamping bagi usaha mikro oleh petugas lapangan UKM.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator Pemberdayaan UKM

Pemerintah sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap pembangunan perekonomian seharusnya tidak mengecilkan peran UKM dalam mendorong perekonomian negara. Oleh karena Pemerintah perlu mengambil peran yang lebih strategis dalam pemberdayaan UKM. Pentingnya peran pemerintah dalam pemberdayaan ini terkait dengan beberapa faktor non ekonomi yang dapat mengganggu kinerja UKM. Faktor nonekonomi berupa oligarki-ekonomi cenderung memunculkan monopoli dan oligopoli karena peran negara yang diminimalkan — yang mana seharusnya berfungsi sebagai pengayom dengan memberikan jaminan hukum dan perundang-undangan. Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari sistematika pembangunan ekonomi “*pro growth*” yang dijalankan, terkadang hal tersebut

memunculkan citra akan peran negara atau pemerintah yang tidak mengayomi dan memberikan jaminan hukum dan perundang-undangan pada potensi kegiatan ekonomi yang potensial, layaknya UKM. Padahal, fenomena berikut: sd

“... fenomena keajaiban yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Menurut dia, dari penelitiannya di delapan negara tersebut menemukan adanya berbagai kombinasi faktor yang sangat mempengaruhi kinerja ekonomi. Pertama, tingginya angka tabungan (*saving rate*) yang ditopang oleh peningkatan sumber daya manusia (*human capital*). Kedua, adanya lingkungan yang berorientasi pada mekanisme pasar, namun tetap mengakui adanya campur tangan pemerintah secara aktif sehingga memungkinkan transfer teknologi dengan baik.”

Hal penting yang dapat ditangkap dari deskripsi di atas adalah bahwa peran pemerintah dalam ekonomi pasar khususnya di Asia posisinya tidak dapat dimimalkan begitu saja. Dengan demikian pemerintah perlu berperan aktif dalam mewujudkan kondisi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya UKM.

Untuk kebutuhan dalam penyerapan tenaga kerja, usaha kecil dan menengah (UKM) dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. Akan tetapi, eksistensinya di dalam struktur APBN kerap mengalami ketidakadilan ekonomi. Kita perlu mencontoh Negara India dalam penyediaan alokasi dana untuk UKM.

kemakmuran di Asia, menurut Stiglitz dalam laporan penelitiannya yang berjudul “*The World Bank Research Observer (Vol. 11, No. 2, 1996)*” yang dinyatakan oleh Prasetyantoko (2001:21), menyiratkan kalimat sebagai Seorang analisis ekonom dari Bank Sentral India, Chandasekharan mengungkapkan bahwa “Salah satu yang pantas dipuji dari India adalah sistem finansialnya yang tidak mendiskriminasikan UKM (*Kompas*, 6 Desember 2006).”

Jika situasi-situasi seperti di atas dapat dimaknai, maka kemandirian ekonomi Indonesia akan dapat diwujudkan. Meskipun menghindari investasi asing dalam perekonomian Indonesia juga merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin di era globalisasi ini, tetapi gagasan dari pengembangan UKM ini, paling tidak, dapat membantu perekonomian Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dari pihak asing. Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kokoh tersebut, UKM perlu diberdayakan agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang. Dalam kaitannya dengan kondisi di atas, maka pemerintah melalui berbagai elemennya, seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Bappenas serta BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang

memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat.

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga perlu melihat permasalahan yang dihadapi oleh UKM. Oleh karena itu berbagai pihak, pemerintah maupun masyarakat perlu mengupayakan hal-hal yang diperlukan oleh UKM (Mohammad JF, 2004). Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
2. Bantuan Permodalan
Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.
3. Perlindungan Usaha
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undangundang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada

saling menguntungkan (*win-win solution*).

4. Pengembangan Kemitraan
Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
5. Pelatihan
Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
6. Membentuk Lembaga Khusus
Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.
7. Memantapkan Asosiasi
Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan Promosi
Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.
9. Mengembangkan Kerjasama yang Setara Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

Peningkatan Peran UKM Indonesia

Pemberdayaan UKM yang dilakukan harus untuk meningkatkan peran UKM dalam memecahkan berbagai persoalan ekonomi Indonesia. Noer Soetrisno menyatakan bahwa pengembangan UKM dapat diarahkan sebagai program penanggulangan kemiskinan. Pengurangan jumlah penduduk miskin tidak hanya berkaitan dengan pengangguran, tetapi pekerja setengah menganggur dan sektor non formal dengan nilai tambah rendah atau resiko usaha tinggi. Untuk itu kuncinya terletak pada peningkatan produktivitas usaha (nilai tambah) untuk meningkatkan nilai tambah per tenaga kerja.

Noer Soetrisni (2004) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan peran dalam mengurangi kemiskinan perlu langkah strategis yang harus diambil oleh UKM. Langkah tersebut antara lain dengan meningkatkan produktivitas dengan intervensi sosial untuk menjadikan masyarakat lebih produktif melalui program sektoral dengan dukungan APBN dan perluasannya. Langkah

lainnya adalah peningkatan pelayanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk meningkatkan kinerja usaha mikro (secara khusus gurem). Upaya ini didukung dengan memperkuat kemampuan LKM dalam pendampingan usaha pada para nasabah. Dengan data yang ada dimana 41 juta unit usaha yang ada adalah usaha mikro, maka sebenarnya pekerjaan terbesar adalah mengangkat instrumen penting bagi pengembangan usaha mikro supaya lebih produktif. Untuk itu aspek pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah menjadi amat penting.

Skema dukungan finansial pemberdayaan UMKM dikembangkan dengan menata sistem pembiayaan UMKM secara fungsional. Untuk pembiayaan mikro ditempuh dengan : a) meningkatkan perkreditan/ pembiayaan mikro didukung dengan perluasan dan peningkatan kemampuan LKM bagi usaha mikro; b) memperlus dan memperbesar kemampuan modal ventura untuk mendukung perluasan usaha, penyehatan usaha dan alih usaha bagi UKM; c) Meningkatkan koordinasi dan informasi program perkreditan perbankan untuk UKM; d) Memperluas ketersediaan penjaminan dan asuransi kredit untuk UKM; e) Melakukan konsolidasi untuk menjaga efektifitas pengguliran dana bergulir yang sudah disalurkan ke masyarakat.

PENUTUP

Peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang relatif lebih besar dibanding usaha besar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) sumbangannya dalam kegiatan ekspor.

Peran UKM sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Pemberdayaan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UKM seharusnya diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru di sektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumberdaya lokal.

Pemberdayaan UKM diharapkan lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dalam

jangka waktu yang relatif pendek dan mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan yang cukup akut di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 2008. Berita Resmi Statistik: *Perkembangan Indikator UKM Tahun 2008*
- Noer Sutrisno, 2004. *Posisi dan Peran Pembangunan UKM 2004-2009*, Infokop Nomor 25 Tahun XX
- Sri Adiningsih, 2002. *Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah*, UGM
- Mohammad, J.F., 2004. *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Infokop Nomor 25 Tahun XX